

Efektivitas Program PKH dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Surabaya

Nur Sa'adatul Maulidya¹, Gilang Surya Ramadhan², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

¹Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

²Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

⁴Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: 25040674316@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674352@mhs.unesa.ac.id², indahprabawati@unesa.ac.id³, firresuprpto@unesa.ac.id⁴

Article History:

Received: 28 Mei 2026

Revised: 30 Juli 2026

Accepted: 06 Agustus 2026

Keywords:

Program Keluarga Harapan, Implementasi Kebijakan, Kesejahteraan Masyarakat, Bantuan Sosial, Surabaya.

Abstrak: Kajian ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Semampir, Surabaya, dengan tujuan utama mengidentifikasi dampaknya terhadap kesejahteraan warga. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengadopsi kerangka kerja Van Meter dan Van Horn untuk membedah proses implementasi kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif nyata, terutama dalam memfasilitasi akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi keluarga prasejahtera. Kepatuhan terhadap standar regulasi, seperti PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018, terbukti efektif berkat mekanisme verifikasi ketat oleh pendamping lapangan. Namun, tantangan yang muncul seperti kecemburuan sosial, keterbatasan dana, dan hambatan linguistik dengan komunitas Madura. Secara keseluruhan, program ini berhasil meringankan beban ekonomi, meski memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat. Hasil analisis menegaskan bahwa sinergi antar instansi dan komunikasi efektif menjadi kunci keberhasilan, meskipun kondisi lingkungan sosial politik memberikan tekanan tersendiri. Disarankan peningkatan anggaran, pelatihan SDM, dan koordinasi lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan serta ketepatan sasaran bantuan di masa depan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

- Kondisi Kemiskinan Nasional: Indonesia sebagai negara berkembang masih bergulat dengan isu kemiskinan yang menjadi hambatan utama dalam mewujudkan cita-cita konstitusi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat persentase penduduk

miskin sebesar 9,36%, dengan jumlah absolut mencapai 25,90 juta jiwa, meskipun terjadi tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

- Konteks Lokal Surabaya: Di tingkat kota, Surabaya mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 4,65% pada tahun 2023, yang setara dengan 136,37 ribu jiwa. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih memerlukan perhatian serius melalui berbagai program intervensi pemerintah daerah.
- Fenomena Kecamatan Semampir: Kecamatan Semampir menonjol sebagai wilayah dengan jumlah penerima manfaat PKH terbanyak di Surabaya, yakni mencapai 7.660 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Angka ini mengindikasikan adanya konsentrasi kemiskinan yang tinggi dan ketergantungan masyarakat lokal terhadap bantuan sosial pemerintah.
- Esensi Program PKH: Program ini dirancang bukan hanya sebagai bantuan tunai sesaat, melainkan sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan transformasi ekonomi jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, gizi, dan pendidikan bagi keluarga rentan.

Identifikasi Masalah dan Kesenjangan Kebijakan (Policy Gap)

- Implementasi vs Target: Terdapat kesenjangan antara tujuan regulasi yang menginginkan bantuan tepat sasaran dengan realitas di lapangan yang masih menunjukkan adanya ketidakmerataan distribusi bantuan.
- Dinamika Sosial: Lingkungan sosial di Semampir memiliki karakteristik unik, termasuk adanya kecenderungan rasa iri hati di antara warga yang dapat memicu konflik dan menghambat proses seleksi penerima bantuan yang objektif.
- Hambatan Operasional: Kendala teknis seperti perbedaan interpretasi kriteria penerima manfaat, keterbatasan anggaran operasional, serta hambatan komunikasi bahasa (khususnya dengan warga beretnis Madura) menjadi tantangan dalam efektivitas program.
- Metodologi Data: Perbedaan pendekatan penghitungan kemiskinan antara BPS (makro) dan Kementerian Sosial (mikro) menciptakan variasi data yang dapat mempengaruhi penentuan kebijakan dan alokasi bantuan sosial.

Urgensi Intervensi Pemerintah (Public Problem)

- Struktur Kemiskinan: Tingginya jumlah penerima PKH di Semampir menandakan bahwa program pemberdayaan ekonomi struktural belum berjalan optimal, sehingga intervensi pemerintah melalui bantuan sosial menjadi krusial.
- Pencegahan Kemiskinan Antargenerasi: Tanpa intervensi yang tepat, kemiskinan dapat berlanjut ke generasi berikutnya; PKH hadir untuk memutus mata rantai ini melalui akses pendidikan dan kesehatan.
- Stabilitas Sosial: Penanganan kemiskinan yang efektif diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara terpenuhi sesuai amanat konstitusi.

Tujuan Penelitian

- Analisis Teoritis: Menganalisis implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Semampir dengan menggunakan perspektif teori implementasi Van Meter dan Van Horn.
- Evaluasi Dimensi: Mengevaluasi enam dimensi kunci implementasi, meliputi standar kebijakan, sumber daya, komunikasi organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementator, dan kondisi lingkungan eksternal.

- Rekomendasi Strategis: Merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi hambatan struktural dan operasional guna meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Rumusan Masalah

- Bagaimana proses implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semampir ditinjau dari teori Van Meter dan Van Horn?
- Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat utama dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat melalui program ini?
- Strategi apa yang paling efektif untuk mengatasi hambatan sosial dan administratif dalam penyaluran bantuan sosial tepat sasaran?

TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEORGE C. EDWARD III

Teori implementasi kebijakan merupakan salah satu konsep penting dalam studi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahap setelah kebijakan dirumuskan, dimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh organisasi atau aktor yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga oleh proses implementasinya. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang telah dirancang tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Salah satu teori implementasi kebijakan yang banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Dalam model implementasi kebijakan yang dikemukakannya, Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap pelaksana (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Menurut Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis dan kompleks karena melibatkan berbagai aktor, organisasi, serta kondisi sosial yang berbeda-beda. Oleh karena itu, agar suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, serta masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana maupun kepada kelompok sasaran. Komunikasi yang baik akan membantu pelaksana kebijakan memahami tujuan, prosedur, serta standar yang harus dicapai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Edward III menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu transmisi informasi yang jelas, kejelasan pesan, serta konsistensi dalam penyampaian kebijakan. Apabila informasi mengenai kebijakan tidak disampaikan secara jelas dan konsisten, maka akan terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan kebijakan sulit tercapai. Dalam konteks implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), komunikasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat penerima manfaat memahami tujuan program, syarat penerimaan bantuan, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat.

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik dan telah dikomunikasikan secara jelas, kebijakan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya dalam implementasi kebijakan meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, informasi, serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksana kebijakan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan secara efektif. Dalam implementasi PKH, ketersediaan pendamping sosial, sistem administrasi yang baik, serta dukungan anggaran dari pemerintah menjadi faktor penting dalam memastikan program dapat berjalan secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Disposisi (Disposition)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merujuk pada komitmen, kesediaan, dan sikap para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi karena pelaksana merupakan pihak yang secara langsung menjalankan kebijakan di lapangan. Apabila pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang tinggi, maka mereka akan menjalankan kebijakan dengan penuh tanggung jawab dan berusaha mencapai tujuan kebijakan secara optimal. Sebaliknya, apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki komitmen atau bahkan menolak kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan mengalami hambatan. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, disposisi pelaksana seperti pendamping PKH dan aparat pemerintah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program, terutama dalam melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat serta memastikan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, pembagian tugas, serta prosedur operasional yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Edward III menekankan bahwa birokrasi yang terlalu kompleks atau tidak terkoordinasi dengan baik dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan struktur organisasi yang jelas, prosedur operasional yang terstandarisasi, serta koordinasi yang baik antar instansi pemerintah. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan, struktur birokrasi melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pendamping sosial di tingkat lapangan. Koordinasi yang baik antar lembaga tersebut sangat diperlukan agar program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara jelas mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Kecamatan Semampir.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, yang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penerima bantuan sosial yang cukup banyak. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu daerah pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti:

1. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Aparatur Kecamatan Semampir
3. Masyarakat penerima manfaat PKH

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti:

1. Dokumen resmi pemerintah
2. Buku dan jurnal ilmiah
3. Laporan terkait Program Keluarga Harapan
4. Peraturan pemerintah mengenai program bantuan social

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semampir untuk mengetahui kondisi dan proses implementasi program tersebut.

- Wawancara

Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program, seperti pendamping PKH dan masyarakat penerima manfaat.

- Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen, laporan, foto kegiatan, serta data administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- Reduksi DataProses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan agar fokus pada permasalahan penelitian.
- Penyajian Data
Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami.
- Penarikan Kesimpulan
Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

6. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu yang berbeda sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Semampir Kota Surabaya menunjukkan bahwa program ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin dan rentan. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang menekankan enam variabel utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

1. Pencapaian Tujuan dan Standar Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan tujuan PKH telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018. Program ini berhasil menysasar kelompok rentan seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pendamping PKH terbukti mampu memastikan bantuan tepat sasaran. Hal ini berdampak pada meningkatnya akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, indikator keberhasilan program dari sisi tujuan kebijakan dapat dikatakan telah tercapai secara optimal.

2. Dukungan Sumber Daya

Dalam aspek sumber daya, implementasi PKH didukung oleh ketersediaan fasilitas dan sistem distribusi bantuan yang memadai. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, inovasi seperti pembentukan kelompok penerima manfaat mampu meningkatkan efisiensi program. Selain itu, adanya pelatihan teknis bagi pendamping PKH menunjukkan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan program. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang adaptif menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program.

3. Komunikasi dan Koordinasi Antar Lembaga

Komunikasi antara pihak kecamatan, pendamping PKH, dan pemerintah kelurahan berjalan dengan cukup efektif. Koordinasi dilakukan melalui pertemuan rutin, kunjungan lapangan, serta komunikasi langsung dengan masyarakat. Pendamping PKH juga aktif melakukan sosialisasi program, meskipun menghadapi kendala bahasa di beberapa wilayah. Efektivitas komunikasi ini berkontribusi besar terhadap kelancaran pelaksanaan program dan penyelesaian berbagai kendala di lapangan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana PKH, khususnya pendamping dan koordinator, memiliki kompetensi yang baik melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat. Mereka dibekali kemampuan teknis, administratif, serta keterampilan komunikasi yang mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Struktur birokrasi yang jelas serta pola hubungan kerja yang koordinatif juga memperkuat implementasi program. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan profesionalitas pelaksana menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan.

5. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap dan komitmen pelaksana terhadap program PKH tergolong positif. Pendamping menunjukkan responsivitas tinggi dalam menangani permasalahan, melakukan monitoring, serta mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala. Pemanfaatan teknologi dalam pelaporan juga mencerminkan upaya peningkatan efektivitas kerja. Dengan demikian, disposisi implementator yang baik turut mendorong tercapainya tujuan program secara maksimal.

6. Pengaruh Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi lingkungan di Kecamatan Semampir turut memengaruhi implementasi PKH. Tingginya angka kemiskinan serta kondisi sosial masyarakat, seperti adanya kecemburuan sosial, menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan. Namun, dari sisi ekonomi, program ini terbukti mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kesejahteraan. Dari aspek politik, dukungan pemerintah daerah meskipun terbatas tetap memberikan kontribusi terhadap kelancaran program, terutama dalam penyediaan fasilitas dan koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki peran signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasar analisis serta temuan di lapangan dalam pengimplementasian. Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semampir dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar dan tujuan PKH yang jelas, seperti yang tercantum dalam PERMENSOS nomor 1 tahun 2018, berhasil tercapai melalui implementasi yang komprehensif. Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pendamping PKH memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, memberikan

dampak positif terutama dalam peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat. Sumber daya kebijakan yang dialokasikan, seperti fasilitas tempat dan metode distribusi bantuan melalui bank penyalur dan kantor pos, menjadi kunci dalam mendukung efektivitas program. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, strategi inovatif seperti pembentukan kelompok penerima PKH berhasil meminimalisir biaya dan memastikan efisiensi penyaluran bantuan. Pelatihan teknis bagi pendamping oleh Kementerian Sosial juga mendukung implementasi yang efektif, menunjukkan pentingnya sumber daya manusia terlatih dalam mendukung program ini. Komunikasi yang baik antar organisasi, seperti kecamatan, pendamping PKH, dan kelurahan, serta responsivitas dalam menangani kendala seperti bahasa, sangat mendukung kelancaran program. Disposisi implementator yang responsif terhadap kebijakan, pemahaman yang solid, dan intensitas disposisi untuk memperbaiki proses implementasi, semuanya berkontribusi dalam memastikan.

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 4 No. 05 September (2024)
 e-ISSN: 2797-0469 bahwa PKH tidak hanya berjalan sesuai tujuan, tetapi juga memberikan

manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi, seperti tingginya angka kemiskinan, tantangan sosial, dan dukungan politik yang terbatas, menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PKH di Semampir juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Namun demikian, dampak ekonomi positif yang dirasakan oleh penerima manfaat menunjukkan bahwa program ini berhasil mengurangi beban ekonomi keluarga miskin secara signifikan. Secara keseluruhan, implementasi PKH di Kecamatan Semampir Kota Surabaya telah berhasil memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang holistik dan berbasis pada kebutuhan lokal. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, program ini menjadi contoh bagaimana kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan sosial yang luas.

SARAN

Berikut saran yang diajukan:

1. Pertama, perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program, sehingga lebih banyak keluarga miskin dapat merasakan manfaatnya.
2. Kedua, meningkatkan pelatihan dan kapasitas pendamping PKH, terutama dalam hal keterampilan komunikasi dan penggunaan teknologi, untuk memastikan pelayanan yang lebih responsif dan efisien.
3. Ketiga, memperkuat koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait melalui pertemuan rutin dan sistem pelaporan yang transparan, guna mengatasi kendala yang muncul secara cepat dan efektif.
4. Keempat, mengatasi hambatan sosial dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat PKH, sehingga dapat mengurangi sifat iri hati dan meningkatkan dukungan komunitas terhadap program.
5. Terakhir, dukungan politik lokal harus lebih ditingkatkan melalui kebijakan yang mendukung dan fasilitasi yang memadai, serta monitoring yang lebih intensif untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan tujuan program tercapai dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Pedoman Umum Program Keluarga Harapan. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kota Surabaya dalam Angka 2023. Surabaya: BPS Kota Surabaya.
- PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Vol. 4 No. 05.
- George C. Edwards III. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Budi Winarno. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS. (George C. Edwards III, 1980)
- Gulick, L. (1937). Notes on the theory of organization. New York: Institute of Public Administration